Representasi Sosial tentang Kiprah PKS di Panggung Politik Indonesia (Analisis wacana situs dikedaikopi.net)

Dini Safitri

ABSTRACT

This study's objective is to discover social representations of political action performed by elite of PKS (Justice and Prosperous Party) during the party involvement in government, as viewed from its grassroots. Using texts and comments from dikedaikopi.net site, the study also intents at better understanding on how internet-based media is representing critic aimed at authority that was legitimated through religious doctrine. This study also intents to discover what is contained within the representation of wealth in Islamic view as well as its form. The study found that political praxis taken into account by PKS had created series of controversies. The controversies led into some debates within their ranks and grassroots, including on the issue of wealth. Up to now, those debates are controlled using religious doctrine of maslahat da'wah (what is favourable for Islamic calling)

Keywords:

Political Islam, PKS, social representations, internet

Latar Belakang

Berakhirnya era Orde Baru telah memungkinkan kembalinya demokrasi multi-partai di Indonesia, sesuatu yang pernah dinikmati bangsa ini dari kurun 1945-1959¹. Kesempatan untuk mendirikan partai-partai baru inipun dimanfaatkan oleh sebagian kalangan Islam untuk mendirikan partai berazaskan Islam ataupun bercirikan Islam. Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi Islam bpada Sidang Istimewa MPR bulan November 1998 berhasil menghapuskan aturan asas tunggal². Era baru multi partai ini

¹ Kehidupan multi-partai di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya maklumat wakil presiden no. X pada November 1945 dan secara teknis berakhir ketika presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. Meskipun setelah dekrit, partai-partai tetap ada, namun mereka dipaksa mengikuti konsepsi demokrasi terpimpin yang dicetuskan Soekarno. Masyumi dan PSI yang mencoba bertahan terhadap paksaan ini, pada akhirnya dibubarkan oleh Soekarno.

² Porter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. 2002, London : RoutledgeCurzon, hal. 217

menjadi ajang kembalinya aspirasi umat Islam Indonesia dalam bentuk partai politik.

Sebelum kejatuhan orde baru, tepatnya mulai akhir tahun 70-an, kebijakan Soeharto memberlakukan normalisasi kehidupan kampus, membuat aktivitas mahasiswa dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan banyak yang bergabung dengan sel-sel organisasi Islam maupun kelompok studi Islam. Masjid –masjid, baik di dalam maupun luar kampus menjadi tempat bagi aktivitas kebangkitan politik dan kebangkitan Islam³.

Di antara kelompok studi Islam kampus, terdapat kelompok yang dikenal sebagai kelompok tarbiyah. Pasca reformasi '98, kelompok ini mewujudkan diri dalam bentuk Partai Keadilan (kini Partai Keadilan Sejahtera). Dalam Anggaran Dasarnya, disebutkan tujuan partai ini adalah "terwujudnya citacita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"⁴. Pada keikutsertaannya yang pertama dalam Pemilu 1999, Partai Keadilan berhasil mendapatkan suara sah sebanyak 1.436.565 dan memperoleh 7 kursi DPR⁵.

Pada tanggal 20 April 2002, Partai Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena gagal memenuhi persyaratan *electoral threshold* sebesar 2.5 % suara untuk mengikuti pemilu 2004. Pada pemilu 2004, PKS berhasil memperoleh lonjakan suara hingga lebih dari 600%. PKS mendapat suara sebanyak 8.149.457 dengan 45 kursi DPR⁶. PKS bahkan berhasil menang di DKI Jakarta dan meloloskan presiden partainya saat itu, Dr. Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara sebesar 262.019 melebihi BPP yang hanya sebesar 232.355⁷ dan menempatkannya sebagai anggota DPR 2004-2009 dengan perolehan suara terbanyak. Hidayat Nur Wahid bahkan kemudian memenangkan pemilihan ketua MPR.

-

³ Porter, op cit, hal. 2

⁴ AD PKS pasal 5, www.pk-sejahtera.org/v2/download/pdf/ad.art.pks.pdf

⁵ www.kpu.go.id

⁶ http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/

http://politik.vivanews.com/news/read/1809-m hidayat nur wahid ma dr,

Lonjakan besar suara PKS pada pemilu 2004 tidak lepas dari keberhasilan PKS membangun citra sebagai partai bersih dan peduli sebagaimana jargon mereka. Berbeda dengan kebanyakan partai yang hanya bergiat menjelang Pemilu, PKS mampu menggerakkan kader-kadernya untuk terus memanaskan mesin partai setiap saat, terutama melalui aksi-aksi sosialnya. Pasca Pemilu 2004, terdapat dua hal yang menarik dan nampaknya memberi pengaruh besar dalam perjalanan partai tersebut. Pertama adalah keikutsertaan PKS dalam pemerintahan. Keikutsertaan yang diberi istilah musyarakah (koalisi/partisipasi) ini memberikan kesempatan PKS untuk berinteraksi langsung dengan administrasi dan birokrasi pemerintahan melalui 3 kementrian yang dijabat oleh kader PKS. Hal yang kedua adalah target politik PKS untuk mendapatkan suara sebesar 20% pada Pemilu 2009. Interaksi langsung PKS dalam administrasi pemerintahan merupakan sebuah benturan langsung antara nilai yang dipegang oleh kader dan organisasi PKS, dengan realitas buruknya administrasi dan birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini PKS dan terutama kadernya, dituntut untuk tetap memegang nilai mereka sambil secara bertahap mengubah keburukan yang terdapat dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Efek lainnya adalah keputusan politik PKS tidak lagi semata-mata mempertimbangkan kepentingan partai dan konstituen, namun juga kepentingan partai lain yang menjadi mitra koalisi. Meminjam istilah Habermas, PKS terlihat menjadi partai yang berjual beli dengan dalih pemersatu⁸. PKS pun terlihat makin akomodatif terhadap kekuasaan.

Kasus akomodasi terhadap kekuasaan antara lain tampak ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM pada tahun 2005. Langkah tersebut memicu protes luas dan menyebabkan beberapa anggota mengusulkan penarikan PKS dari koalisi, namun PKS tetap mendukung pemerintahan. Kasus ini memperlihatakan, alih-alih mengikuti

⁸ Habermas, Jurgen. *Ruang Publik*, 2007, Yogayakarta: Kreasi Wacana, hal. 284

aspirasi 'garis keras', PKS memilih untuk memperhalus 'aspirasi keagamaannya' untuk mengikuti realitas politik Indonesia⁹

Target politik untuk mendapatkan 20% suara pada Pemilu 2009 merujuk pada keberhasilan Masyumi meraih jumlah tersebut pada Pemilu 1955. Dalam rangka mewujudkan target politik tersebut, pimpinan PKS merasa perlu untuk meluaskan basis dukungan dan melepaskan citra eksklusif yang melekat pada partai ini dan kadernya. Sejumlah langkah dilakukan untuk menarik kelompok-kelompok yang selama ini berada di luar jangkauan PKS. Langkah-langkah tersebut tidak jarang terlihat mengorbankan nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh PKS.

Akibat lain dari pragmatisme yang dilakukan oleh PKS, adalah munculnya kelompok baru yang tindakannya tampak tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ditumbuhkan di PKS. Meminjam istilah Weber, kelompok ini tampak sebagai politisi yang hidup dari politik¹⁰. Menurut Weber, kelompok ini memperoleh pendapatan dari upah (fee) maupun imbalan uang atas jasa/layanan mereka di mana tips dan sogokan merupakan bentuk ilegal dari pendapatan jenis ini¹¹. Secara institusi, PKS memang masih mampu mempertahankan citra sebagai partai bersih, hal ini dibuktikan dengan pengembalian secara rutin gratifikasi yang diterima oleh anggota DPR dari PKS kepada KPK hingga mencapai nilai 1,9 miliar rupiah dan merupakan pengembalian terbesar oleh partai politik¹². Keteladanan dalam hal ini juga ditunjukkan oleh Hidayat Nur Wahid ketika ia menyerahkan uang yang ia dapat dalam resepsi pernikahannya kepada KPK¹³. Harian Kompas juga pernah memuat profil Suryama, seorang anggota DPR dari PKS dengan judul Suryama : Satu di antara Sedikit Orang karena ia setiap kali selalu mengembalikan gratifikasi yang ia terima kepada KPK.

.

⁹ Machmudi, Yon, *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*, Phd. Thesis, 2006, Canberra: ANU E Press, hal. 165

¹⁰ Weber, Max, Politic as Vocation, dalam John Dreijmanis, *Max Weber's Complete Writings on Academic and Political Vocation*. 2008. New York: Algora Publishing, hal. 164

¹¹ Weber, *ibid*

¹² http://www.detiknews.com/read/2008/04/23/105912/928046/10/pks-laporkan-gratifikasi-rp-19-miliar-mana-partai-lain

¹³ http://www.antara.co.id/view/?i=1214389902&c=NAS&s=

Kontraproduktif dengan citra dan keteladanan yang dibangun tersebut, kebijakan PKS dalam beberapa hal justru menimbulkan pertanyaan seputar komitmen PKS terhadap pemerintahan yang bersih. Kasus pemilihan gubernur Jawa Tengah merupakan contohnya. Dalam pilkada Jawa Tengah, PKS secara mengejutkan tetap mendukung Sukawi Sutarip sebagai calon gubernur, meskipun yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kasus dana tidak terduga APBD kota Semarang tahun 2004¹⁴

Bagi para pengamat, pragmatisme politik yang ditunjukkan oleh PKSsebagai gerakan keagamaan yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimun di Mesir – tentulah mengejutkan¹⁵. Namun lebih dari para pengamat, sebagian kader PKS sendiri merasa terkejut dangan langkahlangkah yang diambil oleh partai. Partai memang selalu memberikan penjelasan yang disertai dalil keagaamaan untuk melegitimasi langkahlangkah yang diambil pimpinan partai. Contoh ini misalnya dapat dilihat dari seri tausyiyah yang berjudul Musyarakah As-Siyasiyah : Tarjih Bayna Al-*Maslahatayn*¹⁶ (Koalisi/Partisipasi Politik : Memilih yang Lebih Kuat di antara Dua Kebaikan) yang menjelaskan kedudukan koalisi dengan partai sekuler dalam timbangan fiqh Islam. Namun nampaknya dalam tubuh PKS tidak serta merta larut dalam sikap pragmatisme diatas. Banyak pihak di tubuh PKS, terutama dikalangan akar rumput (komunitas moral) yang terus berwacana akan pentingnya sikap teguh pada prinsip. Komunitas moral tersebut memberikan reaksi yang menunjukkan telah terjadi pergeseran diskursus agama yang otoritatif di dalam tubuh PKS, yang dulunya menjadi monopoli sarjana-sarjana agama (ulama -pen) sekarang digantikan oleh adanya akses langsung dan lebih luas terhadap barang-barang cetakan. Akses tersebut kini sudah meluas karena ditemukannya alat komunikasi massa baru, internet.

¹⁴ http://www.suaramerdeka.com/harian/0702/14/nas11.htm

¹⁵ Machmudi, op cit

¹⁶ http://keadilan-jepang.org/articles.php?id=1222

Akses terhadap Internet, sebagaimana ditulis oleh Brunt, telah membuat setiap orang dapat mengklaim sebagai 'otoritas' yang dapat mengeluarkan *ijtihad*, memberikan nasihat dan *fatwa*¹⁷. Penggunaan Internet secara ekstensif sebagai alat untuk memproyeksikan otoritas Muslim dan menyebarkan pandangan keagamaan merepresentasikan integrasi jangka panjang dan berbasis adaptasi teknologi antara simbolisme religius dan pengertian tradisional tentang kekusaan¹⁸. Teknologi cetak dan teknologi lainnya menciptakan bentuk komunitas baru dan telah mengubah batas-batas otoritas dan sosial¹⁹.

Perubahan batas-batas otoritas tersebut membuat internet menjadi sarana bagi kelompok-kelompok yang bermaksud mengkritisi dan mengadakan koreksi (komunitas moral) terhadap langkah-langkah politik PKS. Diskusi-diskusi yang mempertanyakan dan mengkritisi langkah PKS mulai ramai menghiasi berbagai mailing list dan forum baik yang bersifat internal kader maupun yang mencakup masyarakat umum dalam dunia virtual. Dari sekian banyak situs tersebut, terdapat situs dikedaikopi.net. Sebuah situs di internet yang menuliskan pada *heading* situsnya tujuan yang ingin dicapainya lewat komunikasi dunia virtual, komunitas virtual dikedaikopi. Berikut ini tujuan tersebut, yang tersurat di *heading* situs,

komunitas dikedaikopi adalah komunitas mungil, jemari kecilnya mencoba membangkitkan kembali kekayaan nilai yang mulai rontok satu-per-satu, mengetengahkan kekayaan kepribadian yang mulai menepi satu-per-satu, mendalami lagi kekayaan cita-cita yang mulai mendangkal satu-per-satu, yang kian tergerus arus kapitalisasi. Portal ini hadir, sebagai persembahan sederhana, seperti yang pernah dilakukan lelaki itu yang membesarkan lagi jiwa manusia dan kemanusiaan, dari kedai kopi, satu-per-satu²⁰.

Membaca *heading* tersebut, dapat dibaca bahwa komunitas dikedaikopi merupakan komunitas moral yang menengarai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah Islam dalam gerakan Islam, terutama gerakan politik.

¹⁷ Brunt, Gary R., *Islam in Digital Age*.2002.London: Pluto Press, hal. 135

¹⁸ *Ibid*, hal. 2

¹⁹ Eickelman, op cit hal. 143

²⁰ www.dikedaikopi.net

Komunitas moral ini tampaknya juga menengarai adanya perubahan orientasi dan pergeseran nilai dari para aktivis partai politik Islam. Meskipun tidak secara spesifik menyebut PKS, namun menilik tulisan-tulisan yang ada di dalamnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kritisisme yang diajukan tertuju kepada elit PKS, terutama yang berada di parlemen dan duduk di lembaga administrasi dan birokratisasi di pemerintahan. Kaitan komunitas moral ini dengan PKS, tampak lebih jelas jika kita menelusuri asal nama situs dikedaikopi. Nama kedai kopi, merujuk pada tempat di mana Hasan Al-Banna (pendiri Ikhwanul Muslimun) memulai aktivitas da'wahnya. Keterkaitan Hasan Al Banna atau Ikhwanul Muslimun dengan PKS, walau tidak secara gamblang diakui oleh tokoh-tokoh PKS, memiliki hubungan dalam adopsi ajaran dan metode dakwah Hasan Al Bana oleh struktur kaderisasi PKS. Oleh komunitas moral ini, melalui komunikasi di dunia virtual, mereka mencoba mengembalikan representasi ajaran dan metode dakwah Hasan Al Bana yang ditengarai telah mengalami perubahan pada beberapa pribadi elit PKS yang duduk di legislatif dan eksekutif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan paradigma representasi sosial, yang merupakan metateori dari berbagai bidang ilmu sosial, termasuk diantaranya komunikasi dan psikologi sosial. Dasar epistemologis dari Teori Representasi Sosial adalah bahwa representasi sosial merupakan integrasi atau kombinasi antara perspektif konstruktivis dan interaksionis. Konsep interaksi berdasarkan dinamika interpersonal dan pertukaran sosial yang terjadi secara secara terus menerus.

Konsep ini menunjukkan tentang masyarakat yang terorganisir dan selalu bisa dilihat dalam struktur kelas, grup, sub grup yang bisa memetakan letak individu. Dunia masyarakat selalu dilihat secara lengkap dengan seluruh kompleksitas dan peraturan yang terbentuk di dalamnya, termasuk nilai-nilai ideologis dn implikasi normatifnya, serta integrasi antara isi dan bentuk.

Status epistemologis dari representasi sosial megenai sesuatu hal adalah seberapa keleluasaan makna yang diproduksi dari hal tersebut dan

bagaimana efeknya pada keadaan sosial. Konsekuensi ontologis dari paradigma ini adalah bahwa realitas yang merupakan konstruksi sosial bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Secara aksiologis, peneliti menempatkan diri sebagia fasilitator, dimana nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian. Konsekuensi metodologis paradigma ini adalah menekankan empati dan intraksi dialektis antara peneliti dan responden melalui metode kualitatif, dimana kriteria kualitas penelitian dinilai melalui authenticity, trustworthiness dan reflectivity, yaitu sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial.

Penelitian ini juga menggunakan analisis kesejarahan untuk melihat representasi sosial yang terbentuk atas perilaku partai politik Islam di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa representasi sosial memungkinkan terjadinya komunikasi di antara anggota komunitas dengan menyediakan kode untuk pertukaran sosial dan kode untuk menamai dan mengklasifikasikan secara tidak ambigu berbagai aspek dunia mereka, individu mereka dan sejarah kelompok mereka. Pendekatan representasi sosial tidak dapat berbuat apa-apa tanpa perspektif sejarah²¹. Makna dari objek-objek sosial yang ada saat ini dibentuk oleh kejadiankejadian di masa lalu. Pendekatan representasi sosial memungkinkan kita untuk menangkap fenomena makro-sosial dalam totalitas dan dinamika sejarah²²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Creswell, 2002: 1) merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informasi secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar

²¹ Wagner, Wolfgan, et al, Theory and Method of Social Representations (online).1999. London: LSE Research Online, hal. 5 ²² *Ibid*

alamiah. Penelitian kualitatif dari segi epistomologis²³ menempatkan diri sebagai insider, memiliki empati (atau kemampuan memproyeksikan diri ke dalam peran dan persepsi objek yang diteliti), dari segi ontologis berasumsi realitas sosial selalu berubah merupakan hasil konstruksi sosial dan bersifat *ideographic*.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan analisis wacana yang mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Setelah dilaksanakan metode pengumpulan data diatas, maka dilakukan tahapan analisis data. Tahapan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu:

- 1. Langkah pertama adalah membuat analisis teks dan komentar dari data yang sudah dipilah. Analisis tersebut menggunakan analisis wacana kritis pada level teks (mikro). Untuk validasi data teks, maka hasil analisis teks tersebut dibandingkan dengan analisis komentar. Kemudian dari analisis tersebut dicari dan dipilah kata-kata kunci yang menunjukkan pemaknaan terhadap konsep Islam dan politik. Terdapat 35 kategori teks dan 25 kategori komentar yang di dapat dalam penyusunan kata kunci pada penelitian ini.
- 2. Langkah kedua adalah penyusunan koding dan kategorisasi kata kunci yang telah ditemukan didalam sebuah buku koding. Buku koding berisikan data tabel yang menunjukan angka-angka yang mengambarkan jumlah teks dan komentar yang menuliskan kata kunci.
- 3. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dalam buku koding, disusun dalam bentuk tabulasi, dan diolah untuk mencari frekuensi dan persentase dari total kata kunci.
- 4. Setelah data diolah seperti proses diatas, diperoleh sebaran untuk setiap variabel. Selanjutnya dilakukan pemilahan data untuk

²³ Hidayat, Dedy N., Metodologi Penelitian Klasik dan Hypotethico-Deductive Method, 2005

memilih data mana saja yang memiliki sebaran signifikan untuk disusun dalam sebuah klaster beserta kategorinya. Klaster berguna untuk memetakan hasil penelitian. Dengan adanya klaster, diharapkan dapat memudahkan pembaca membaca hasil penelitian yang akan dipaparkan selanjutnya. Adapun klaster dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Gambaran Umum Portal dikedaikopi
- Ajakan kembali ke pokok ajaran Islam
- Konflik antara ajaran dan praktik

No	Kategori	Total	Klaster
		Koding	
1	Etika Hiwar	375	Gambaran
2	referensi teks	219	Gambaran
3	Referensi komentar	182	Gambaran
4	Organisasi IM	15	Gambaran
5	Muslim Ideal	232	Pokok Ajaran
6	muslim ideal	206	Pokok Ajaran
7	masyarakat muslim ideal	153	Pokok Ajaran
8	Masyarakat Muslim Ideal	125	Pokok Ajaran
9	nilai moral	22	Pokok Ajaran
10	Larangan	78	Pokok Ajaran
11	nasihat tentang niat	20	Pokok Ajaran
12	pemimpin yang ditolak	454	Konflik
13	Pemimpin Ideal	450	Konflik
14	Sikap terhadap pemimpin	164	Konflik
15	Sikap yang ditolak	103	Konflik
16	Orang kaya yang diidealkan	80	Konflik
17	Definisi tentang kekayaan	75	Konflik
18	konotasi sikap mewah	73	Konflik
19	Pengertian Hidup ideal	53	Konflik

20	Konotasi Mewah	53	Konflik
21	Setuju/tidak setuju pada ide		
	kaya	46	Konflik
22	Justifikasi menolak kekayaan	44	Konflik
23	common sense	39	Konflik
24	cara menjadi kaya	38	Konflik
25	cara menjadi kaya	28	Konflik
26	justifikasi menolak Kekayaan	26	Konflik
27	hakikat kekayaan di dunia	23	Konflik
28	definisi kekayaan	23	Konflik
29	justifikasi agama	23	Konflik
30	alasan kaya	11	Konflik
31	pengertian hidup ideal	11	Konflik

Tabel -1 Klaster, Kategori dan Total Koding

5. Pembacaan atau pembahasan hasil analisis data akan diterangkan dalam bab IV.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka hasil temuan ini tidak dapat digeneralisasikan, hanya menunjukkan kecenderungan ke arah mana. Guy Cook menjelaskan bahwa analisis wacana memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; khalayaknya, situasi apa, melalui medium apa, bagaimana, perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi dan hubungan masing-masing pihak (Eriyanto,2002:9). Hal sentaralnya adalah teks dan konteks. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi. Konteks adalah memasukan semua jenis situasi dan hal yang berada dilar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, situsai dimana teks itu diproduksi serta fungsi yang dimaksudkan.

Hasil Penelitian

Kiprah elit PKS di era musyarakah merupakan bagian dari pengalaman PKS sebagai sebuah partai politik. Sebagai sebuah partai politik, PKS memiliki

perangkat dan definisi yang dimiliki sebuah parpol. Menurut UU No.31/2002, partai politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Mengacu pada PKS, yang dimaksud dengan sekelompok warga Negara republik Indonesia ialah jemaah tarbiyah, sebuah jemaah yang lahir sebagai reaksi atas politik kebijaksaan orde baru yang mengaleniasi gerakan Islam di Indonesia. Jemaah tarbiyah hadir dikalangan intelektual kampus dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus, sebuah lembaga yang merekrut mahasiswa muslim yang memiliki ketertarikan besar untuk belajar dan mendalami ideologi Islam sebagai sistem hidup dan memadukannya dalam sebuah gerakan kemahasiswaan.

Pada demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang berhasil menumbangkan kekuasaan rezim orde baru, jemaah tarbiyah yang diwakili oleh lembaga dakwah kampus, beserta elemen mahasiswa yang berada di dalam satu gerakan yang sama seperti KAMMI, juga ikut serta di dalamnya. Setelah rezim orde baru tumbang, digantikan oleh era reformasi, jemaah tarbiyah tidak mau kehilangan momentumnya untuk mewujudkan diri dalam bentuk partai Keadilan yang dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Namun pada tanggal 20 April 2002, Partai Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena gagal memenuhi persyaratan *electoral threshold* sebesar 2.5 % suara untuk mengikuti pemilu 2004.

Tidak seperti pemilu sebelumnya, pada pemilu 2004, PKS berhasil memperoleh lonjakan suara hingga lebih dari 600%. PKS mendapat suara sebanyak 8.149.457 dengan 45 kursi DPR²⁴. PKS bahkan berhasil menang di DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi PKS di kala itu. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dengan metode pembinaan kader PKS dalam jama'ah tarbiyah. Melalui pola pembinaan tersebut, PKS pada

²⁴ http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/

pemilu 2004, berhasil mengokohkan citranya sebagai partai dakwah yang bersih, peduli dan profesional. Disatu sisi capaian PKS pada pemilu 2004 tersebut, menemui kendala di lapangan, berupa konflik antara pokok ajaran Islam yang terdapat dalam manhaj jama'ah tarbiyah dengan praktik berpolitik pada level kenegaraan dan pemerintahan. Konflik tersebut kerap melanda para elit yang langsung bersentuhan dengan praktik berpolitik dalam pemerintahan. Sebagai suatu jama'ah, konflik yang terjadi ditingkat elit, dapat dirasakan langsung pada tingkat bawahan (kader). Salah satu konflik yang menimbulkan keresahan pada kader PKS adalah perilaku elit yang dinilai menyimpang dalam mensikapi kekayaan. Keresahan kader tersebut, ternyata kurang mendapat respon dari elit, sehingga kader membawa konflik tersebut ke ruang publik, internet, untuk dibicarakan secara interaktif, guna mendapatkan gratifikasi berupa kontak sosial dengan kader yang merasa sepemikiran maupun yang tidak sepemikiran, agar terjadi dialog yang merepresentasikan keresahan kader. Komunitas dikedaikopi menjadi ruang untuk hal tersebut, sehingga dijadikan bahan dalam penelitian ini.

Mengacu pada pikiran Habermas mengenai ruang publik, apa yang dilakukan komunitas portal dikedaikopi merupakan gambaran dari cerminan masyarakat modern yang menciptakan publiknya sendiri dan membentuk kesamaan abstrak konten komunikasi dalam bentuk komunikasi umum. Melalui portal dikedaikopi, komunitas virtual dikedaikopi berusaha mengangkat keresahan yang terjadi pada 'orang-orang' PKS, sebagai bentuk representasi politik keagamaan yang bertujuan untuk membangun kesadaran berpolitik masyarakat . Berikut ini gambaran Analisis pikiran keilmuan tentang partai politik, pikiran awal berdirinya PKS dalam praktik kehidupan berpolitik sehari-hari & common sense nya sehingga membentuk representasi sosial mengenai kiprah PKS di panggung politik Indonesia (pemikiran sosial, kebaruan):

Gambar 1.1 Alur Representasi Kiprah PKS

Pikiran Keilmuan —— PKS —— Representasi Kiprah

1. Representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karena itu hendak diperjuangkan. Parpol biasaya mempunyai asas, tujuan, ideology, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam programprogramnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa (Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu politik. Grasindo.1992) 2 Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum (UU. No.31/2002)

Pikiran Awal

- 1. Jemaah tarbiyah yang lahir sebagai reaksi kebijakan politik orba, turut melahirkan reformasi. Pada era tersebut, jemaah ini mengartikulasi dalam bentuk partai politik (dulu PK karena tidak lulus UU ET berubah menjadi PKS)
- 2. Partai Dakwah yang bersih, peduli dan professional
- 3. Partai berasakan Islam
- 4. Bersih dari KKN,
- Peduli kepada masyarakat (aktif dalam kegiatan social dan kemasyarakatan), Professional dalam kinerja profesi dan kelembagaan
- 5. Mencontoh pola gerakan ikhwanul muslimun di mesir
- 6. Pola rekruitmen kader merupakan bagian dari kaderisasi jemaah tarbiyah yang dibina dalam usrah
- 7. Pembinaan usrah meliputi pembinaan individu muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim sampai ke tahapan pembentukan daulah Islamiyah

- 1. Jemaah tarbiyah juga tidak kedap terhadap arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat (terjadi perubahan cara pandang terhadap tuntutan sosial yang berlaku di masyarakat/ ikut dalam arus modernisme)
- 2. Citra sebagai partai dakwah yang bersih, peduli dan profesinal terbentur kepada tuntutan politik (akomodatif terhadap kekuasaan -> musyarakah)
- 3. Pembinaan usrah belum mampu menjawab setiap langkah dan kebijakan musyarakah, sehingga konflik dibawa keruang publik lewat media baru (internet)
- 4. Peran internet sebagai media gratifikasi merepresentasi keresahan kader PKS atas ijtihad musyarakah elit PKS
- 5. Bentuk keresahan tersebut bisa terus berubah dari waktu ke waktu

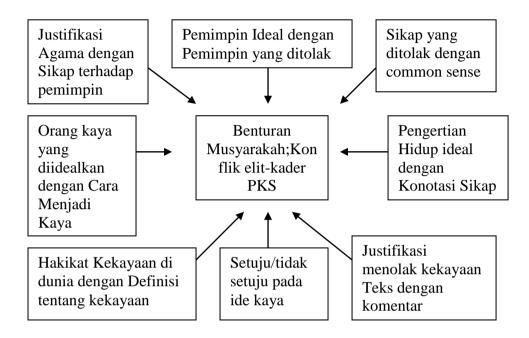
Gambar diatas menunjukkan pada kita bahwa, Representasi sosial mengenai Kiprah PKS di panggung politik Indonesia dibentuk dari dua pikiran, yaitu pikiran keilmuan yang melatarbelakangi penggurus dan massa PKS membentuk partai politik dengan pikiran awal yang terbangun dalam pikiran umum penggurus dan masa PKS terhadap bentuk PKS yang diidealkan. Dari pikiran keilmuan didapatkan makna bahwa partai politik adalah Representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karena itu hendak diperjuangkan. Parpol biasaya mempunyai asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang

diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa ²⁵.

Dari pikiran keilmuan diatas, oleh pengurus dan massa PKS dibentuk pikiran umumnya di dalam cara pandang mereka, yaitu PKS adalah Partai Dakwah yang bersih, peduli dan professional (bentuk PKS yang diidealkan.). Bentuk PKS yang diidealkan bersumber kepada faktor kesejarahan yang membentuk PKS, dari mulai sejarah masuknya Islam ke Indonesia sampai aleniasi politik kebijaksanaan orde baru, serta pengkaitan gerakan Islam transnasional, yaitu sama seperti gerakan Islam lainnya yaitu ingin membentuk apa yang disebut dengan daulah Islamiyah. Hanya saja, metode dan cara yang digunakan antara gerakan islam yang satu dengan yang lainnya berbeda. Bentuk penyebaran pikiran umum yang diidealkan tersebut disebarkan dengan gerakan usroh dalam jemaah tarbiyah PKS. Dengan cara pandang ini pengurus dan massa PKS menjalankan program partai demi mencapai misi dan tujuan PKS.

Namun dalam praktiknya tidak semua yang diidealkan tersebut dapat diwujudkan dengan mudah. Terdapat banyak benturan dan konflik yang terjadi di kehidupan berpolitik para elit. Diantaranya: 1). Jemaah tarbiyah, terutama para elit, juga tidak kedap terhadap arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat (terjadi perubahan cara pandang terhadap tuntutan sosial yang berlaku di masyarakat/ ikut dalam arus kapitalisme global. Padahal awalnya ingin menjadi antithesis dari kapitalisme global). 2) Citra sebagai partai dakwah yang bersih, peduli dan profesional terbentur kepada tuntutan politik (akomodatif terhadap kekuasaan→ musyarakah). 3) Pembinaan usrah belum mampu menjawab setiap langkah dan kebijakan musyarakah, sehingga konflik dibawa keruang publik lewat media baru (internet). 4) Peran internet sebagai media gratifikasi merepresentasi keresahan kader PKS atas ijtihad musyarakah elit PKS. 5) Bentuk keresahan tersebut bisa terus berubah dari waktu ke waktu. Namun dalam penelitian ini gambaran keresahan kader PKS terpampang dalam gambar berikut ini:

²⁵ Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu politik. Grasindo.1992



Gambar 1.2 Keresahan Kader PKS

Gambaran diatas menunjukkan kepada kita terdapat perubahan dalam praktik berpolitik pada elit PKS dengan komunitas moral PKS yang berada ditataran akar rumput. Perubahan tersebut menimbulkan representasi konflik antara elit dan akar rumputnya, mulai dari level individual, social dan epistimologis. Pada level individual terjadi efek psikologis berupa ketegangan individu akar rumput yang tidak menerima adanya perubahan misi dan tujuan elit mengenai pengertian hidup ideal, definisi kekayaan, orang kaya yang diidealkan, cara menjadi kaya, sampai kepada justifikasi agama yang dilakukan elit PKS. Ketegangan itu berwujud dalam berbagi pendapat dan dialog yang disampaikan komentator dikedaikopi.

Pada level sosial, individu-individu yang bersitegang dalam komunitas dikedaikopi kemudian mengubah konflik menjadi integrasi. Karena disetiap komentar dan dialog yang terjadi, menunjukkan adanya toleransi dalam mengemukakan pendapat serta mengedepankan sikap berbaik sangka. Sedangkan pada level epistimologi, menyangkut pikiran mendasar yang

bergerak pada masyarakat dan berpengaruh pada pada individu komunitas dikedaikopi dalam mengerakan wacana mengenai kiprah elit PKS adalah pentingnya untuk kembali dan senantisa mengarahkan perilaku dan moralitas elit PKS berserta akar rumputnya kesumber pokok ajaran Islam, Al Qur'an dan As Sunnah, terutama mengenai ide kaya yang disetujui dalam konsesual manhaj tarbiyah PKS.

Daftar Pustaka

Buku

Brunt, Gary R. (2002). Islam in Digital Age. London: Pluto Press.

Creswell, John. (2002). Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches.

Jakarta.: KIK Press.

Dreijmanis, John. (2008). Max Weber's Complete Writings on Academic and Political

Vocation. New York: Algora Publishing.

Eickelman, Dale F dan James Piscatori. (1998). *Ekspresi Politik Muslim*. Bandung: Mizan.

Eriyanto. (2002). Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta:LKis.

Habermas, Jurgen. (2007). Ruang Publik. Yogayakarta: Kreasi Wacana.

Hidayat, Dedy N. (2005). *Metodologi Penelitian Klasik dan Hypotethico-Deductive Method*. Jakarta:UI Press.

Porter, Donald J. (2002). *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: RoutledgeCurzon.

Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu politik. Jakarta: Grasindo.

Thesis

Machmudi, Yon. (2006). *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*, Phd. Thesis. Canberra: ANU E Press

Jurnal Online

Wagner, Wolfgan, et al. (1999). *Theory and Method of Social Representations* (online). London: LSE Research Online.

Data Penulis

Penulis lahir di Pariaman, 6 Febuari 1984. Lulus S1 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, jurusan Jurnalisitik, pada Mei 2006. Lulus S2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi pada Juli 2009. Kini berprofesi sebagai dosen tetap DIII Hubungan Masyarakat FIS UNJ. Memiliki alamat email:

<u>mynameisdinisafitri@yahoo.com</u> dan pin BB: 2806F512. Bisa dihubungi di nomor ponsel 081931355066.